

**DISPARITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAMBI**

Selamet Rahmadi

Magister Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak,
UNJA Mendalo Darat

ABSTRAK

Sumber penerimaan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2005-2010 dari PAD, dana perimbangan, bagi hasil pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain yang sah memiliki kesenjangan atau disparitas termasuk kedalam golongan antara rendah ($< 0,30$) dan sedang ($0,30 - 0,40$). Khusus penerimaan bagi hasil bukan pajak terdapat 9 Kabupaten/Kota termasuk kedalam golongan ketimpangan atau disparitas rendah, sedang dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Bungo termasuk kedalam golongan ketimpangan atau disparitas tinggi ($> 0,40$).

Kata-Kata Kunci : *Sumber Penerimaan Daerah, Kesenjangan atau Disparitas*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah pada prinsipnya ingin mencapai beberapa tujuan pokok yaitu : 1). mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2). mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 3). mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya dan 4). mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Prinsip-prinsip pokok terkandung dalam otonomi daerah dirasa sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan pembangunan yang menghendaki adanya peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, mampu mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Upaya-upaya kongkrit harus dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan daerah, pengembangan dunia usaha daerah, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat serta aspek lainnya.

Pesatnya pembangunan di daerah mengharuskan daerah memperbaiki semua aspek yang diuraikan diatas. Salah satu aspek yang memegang peranan penting dan harus diperbaiki serta ditingkatkan adalah aspek

keuangan (fiskal). Aspek keuangan (fiskal) yang dapat dipungut atau dihimpun akan sangat mendukung keberhasilan serta pencapaian pembangunan. Ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Upaya menggali atau menghimpun sumber dana pembiayaan melalui sumber penerimaan sendiri bagi daerah sering menghadapi banyak kendala. Kendala inilah yang nantinya menghambat proses pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Kendala yang sering dihadapi daerah dalam menghimpun atau mengumpulkan sumber penerimaan adalah adanya terdapat perbedaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kepastian hukum, kelembagaan pendukung, dan keterbatasan sumber penerimaan yang potensial di masing-masing daerah.

Keterbatasan yang ada pada masing-masing daerah dapat mengakibatkan kemajuan dicapai daerah berbeda-beda. Perbedaan ini akan memberi pengaruh besar pada terciptanya kesenjangan antara daerah, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, sosial, ekonomi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kesenjangan inilah pada akhirnya membawa pengaruh pula pada sumber penerimaan yang mampu dipungut tiap daerah.

Daerah yang maju atau makmur, akan dapat menghimpun dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan dengan mudah berbeda dengan daerah yang tidak maju atau makmur. Daerah maju atau makmur akan memiliki potensi sumber penerimaan yang besar dan berbeda dengan daerah tidak maju atau tidak makmur yang memiliki potensi sangat terbatas.

Sumber penerimaan bagi daerah dapat dipungut melalui PAD, dana perimbangan, pinjaman dan penerimaan lainnya yang sah. Upaya peningkatan penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan setiap tahunnya, seiring dengan semakin luas dan kompleknya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pemberian otonomi pada daerah diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan tepat, baik dan akurat. Fungsi yang melekat pada pemerintah daerah akan mendorong bagaimana pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber penerimaan menjadi belanja daerah yang potensial dan bersifat produktif, sehingga mendorong peningkatan aktifitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Perluasan aktifitas yang mampu dibiayai oleh sumber pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik, mengurangi kesenjangan tingkat

investasi, mengurangi kesenjangan pembangunan antar sektor dan yang tidak kalah penting dapat meningkatkan kembali sumber penerimaan daerah.

Kondisi atau fenomena diatas juga berlaku untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi. Ketersediaan dan kemampuan menggali dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan harus terus ditingkatkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta mengurangi kesenjangan atau ketimpangan (disparitas) pembangunan termasuk kesenjangan keuangan (fiskal) antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi. Pentingnya ketersediaan dan meningkatkan sumber penerimaan sebagai sumber belanja daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, mendorong dan perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam bagaimana disparitas keuangan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi, khususnya dari PAD, dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, DAK dan penerimaan lainnya yang sah.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai adalah : untuk mengukur, menganalisis dan mengetahui disparitas keuangan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi dilihat dari PAD, dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, DAK dan penerimaan lainnya yang sah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya menyusun APBD. Penghimpunan, penggunaan dan pengelolaan keuangan (fiskal) di daerah dapat tercapai dengan adanya pemberian otonomi pada daerah, dimana daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam proses pembangunan. Pemberian otonomi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengadaan keuangan daerah, sehingga bisa mandiri dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Tolok ukur suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menurut Widjaja (2002) terlihat dari : 1). kemampuan struktur organisasinya dalam menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, 2). kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, 3). kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendorong peran serta rakyat dalam kegiatan pembangunan, 4). kemampuan keuangan daerah dalam membiayai semua kegiatan atau tidak

melalui pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainya dan digunakan seoptimal mungkin, sehingga dapat mendukung proses pembangunan daerah.

APBD sebagai anggaran yang menjelaskan daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. (Suparmoko, 2001). Pentingnya anggaran dalam pembangunan terlihat dari fungsi yang terkandung didalamnya yaitu :1). menjamin adanya alokasi unsur-unsur produksi yang tepat, 2). mengadakan distribution of nasional income yang lebih baik, dan 3). memelihara stabilitas didalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2002) bahwa fungsi anggaran : 1). fungsi politik, 2). fungsi pengawasan yaitu untuk melakukan pengawasan intern dan pengawasan efisiensi dan 3). fungsi mikro ekonomi.

Secara krusial anggaran belanja harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga akan terlihat :1). ada pertanggung jawaban pemungutan pajak dan lain-lain oleh pemerintah,2). ada hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya, 3). ada pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan

pola penerimaan pemerintah dan tingkat distribusi penghasilan /pembiayaan dalam perekonomian dengan mengacu pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis, kemandirian dan Efisiensi Sejalan dengan apa yang dikemukakan diatas, menurut Mahi (2005) hendaknya anggaran belanja haruslah :1). self-liquidating, 2). reproduktif dan 3). self-liquidating dan reproduktif.

Suparmoko (2001) menyatakan sumber-sumber keuangan daerah dapat dikemukakan sebagai berikut: 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2). penerimaan dari perimbangan, 5). pendapatan daerah dari pemberian subsidi, 6). pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus dan 7). penerimaan-penerimaan daerah dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil-hasil penerimaan tersebut dipergunakan oleh pemerintah daerah (provinsi) untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah secara garis besar dikelompokan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.(Halim, 2001). Djamin (1993) menjelaskan, bahwa pengeluaran tersebut dalam upaya meningkatkan pembiayaan proyek-proyek melalui pelaksanaan pembangunan departemen dan lembaga non departemen yang diupayakan terus ditingkatkan.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari pembangunan nasional mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (region) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut melalui kenaikan seluruh nilai tambah (value added). Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh nilai tambah yang tercipta juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi transfer payment terjadi pada suatu daerah dari daerah lain. (Tarigan, 2005)

Kemakmuran suatu wilayah dapat tercapai, jika daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi menurut padangan ekonomi klasik dan neo klasik ditentukan oleh empat faktor yaitu : 1). jumlah penduduk, 2). jumlah stok barang modal, 3). luas tanah dan kekayaan alam dan 4). tingkat teknologi yang digunakan. (Sukirno dalam Kuncoro, 2004). Teori pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah selain seperti yang dikemukakan diatas juga dikemukakan oleh beberapa ahli (Richardson, 2001 dan Tarigan, 2005) yaitu : 1). Teori Ekspor Base, yang

mencoba menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung dari pertumbuhan industri ekspornya dan kenaikan permintaan yang bersifat ekstrim bagi daerah melalui adanya perbedaan sumber daya dan keadaan geografis antar daerah. sehingga daerah mempunyai keuntungan lokasi terhadap beberapa sektor kegiatan produksi. Pendekatan yang biasa digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor merupakan basis dan non basis digunakan pendekatan Location Quotient (LQ), 2). Teori Kumulatif Causation, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjadi melalui kemajuan teknologi, keuntungan perusahaan, berlakunya mekanisme pasar dan adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, 3). Teori Core Periphery, yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terjadi melalui andanta interaksi antara pembangunan pedesaan dan perkotaan.

Keterbatasan suatu wilayah akan kepemilikan faktor produksi akan menghambat daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang nantinya akan mengakibatkan terjadi ketimpangan pembangunan /kesenjangan ekonomi antar daerah, baik ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor serta keuangan daerah.

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan tersebut dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan : 1). konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, 2). alokasi investasi, 3). tingkat

mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, 4). sumber daya alam 5). kondisi demografis dan 6). mobilitas perdagangan. (Tambunan, 2001). Ketimpangan pembangunan antar daerah secara teori dapat diukur melalui indeks ketimpangan Williamson dan ketimpangan pendapatan melalui pendekatan Indeks Theil atau melalui Indeks Gini Ratio bank dunia. (Kuncoro, 2004). Nilai Indeks Williamson dan Indeks Theil terletak antara mendekati 1 yaitu sangat timpang dan mendekati 0 yaitu sangat merata. Ying (2000) menjelaskan pembagian interval ketimpangan menjadi : 1). $< 0,30$; ketimpangan pendapatan antar wilayah rendah, 2). $0,30 - 0,40$; ketimpangan pendapatan antar wilayah sedang, 3). $> 0,40$; ketimpangan pendapatan antar wilayah tinggi.

Pemerintah sebagai leader dalam pembangunan hendaknya harus menjalankan fungsi yang dimiliki secara benar dan efektif, dimana fungsi pemerintah dalam pembangunan yaitu sebagai : 1). fasilitator, 2). koordinator, 3). stimulator dan 4). entrepreneur. (Blakely, 1994). Fungsi yang ada tersebut diharapkan akan dapat memacu pemerintah dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang digunakan data sekunder (time series) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meliputi : 1). realisasi PAD, dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain yang sah, 2). PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi atas dasar harga konstan tahun 2000, 3). jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi.

Pengukuran tingkat disparitas keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menggunakan pendekatan Indeks Williamson (Kuncoro, 2004) yang telah disesuaikan dengan variabel yang akan diukur.

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Dimana :

Y_i = sumber penerimaan j perkapita Kabupaten/Kota i Provinsi Jambi

Y = rata-rata sumber penerimaan j perkapita Provinsi Jambi

f_i = jumlah penduduk Kabupaten/Kota i Provinsi Jambi

N = jumlah penduduk Provinsi Jambi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan menghendaki adanya perbaikan tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, tingkat harapan hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta tidak menimbulkan ketimpangan antar lapisan masyarakat dan antar daerah adalah tujuan dari pembangunan. Tujuan tersebut dapat dicapai, jika pemerintah daerah yaitu Kabupaten/Kota yang ada pada suatu Propinsi berupaya meningkatkan sumber penerimaannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Besarnya sumber penerimaan dapat digali, membuat daerah memiliki ketersediaan dana bagi pembiayaan kegiatan pembangunan disetiap sektor. Sumber penerimaan Kabupaten/Kota dapat digali dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan, pengaturan, penyelenggara pembangunan serta perwakilan. Kemampuan daerah memanfaatkan keunggulan serta menjalankan fungsinya dalam pembangunan diharapkan membawa efek positif bagi pembangunan terutama dalam mengurangi disparitas atau

ketimpangan di setiap aspek, baik pemerataan pembangunan, tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan fiskal antar daerah. Kemampuan pemerintah daerah mengurangi ketimpangan fiskal memberi pengaruh mengurangi kesenjangan fiskal yang bersifat vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya nasional, perbaikan tata kelola keuangan daerah dan memberi jaminan terhadap kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam pelaksanaannya bersumber dari : PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan menggali sumber penerimaan akan memberi pengaruh pada upaya menjaga kesinambungan ketersediaan keuangan di daerah. Ketersediaan keuangan di daerah sering menghadapi kendala dalam proses penghimpunannya. Kendala tersebut terjadi sebagai akibat : sistem penetapan yang rumit, sumberdaya manusia terbatas, data tidak akurat, hukum yang melindungi dan keterlambatan dalam membuat usulan serta penyaluran dari pemerintah daerah ke pusat atau sebaliknya. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang akhirnya menimbulkan ketimpangan atau disparitas keuangan antar daerah.

4.1. Disparitas PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

PAD sebagai sumber penerimaan utama Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi setiap tahun terus mengalami peningkatan. PAD yang besar mencerminkan kemampuan Kabupaten/Kota membiayai belanja daerah tanpa adanya ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat. Peningkatan yang terjadi belum mencerminkan kemampuan Kabupaten/Kota untuk melepaskan diri dari ketergantungan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi karena perbedaan sumberdaya yang berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kesenjangan atau disparitas PAD Kabupaten/Kota memberi hasil bervariasi.

Berdasarkan hasil perhitungan dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 7 Kabupaten/Kota memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan PAD selama tahun 2005 – 2010 di bawah 0,30. Kabupaten/Kota tersebut adalah : Kabupaten Batanghari sebesar 0,06071 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 1 terendah, Kabupaten Bungo sebesar 0,06554 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 2 terendah, Kabupaten Tebo sebesar 0,08289 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 3 terendah, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,09160 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 4 terendah, Kota

Jambi sebesar 0,15444 atau Indeks Williamsonya menduduki peringkat 5 terendah, Kabupaten Tanjungjabung Barat sebesar 0,15753 atau Indeks Williamsonya menduduki peringkat 6 terendah dan Kabupaten Tanjungjabung Timur sebesar 0,17918 atau Indeks Williamsonya menduduki peringkat 7 terendah. Angka ini memberi arti penerimaan PAD di 7 Kabupaten/Kota termasuk dalam golongan yang memiliki ketimpangan atau disparitas keuangan rendah.

Kabupaten yang memiliki ketimpangan atau disparitas PAD termasuk dalam golongan sedang atau Indeks Williamson terletak antara 0,30 – 0,40 di Provinsi Jambi ada 3 Kabupaten yaitu : Kabupaten Kerinci sebesar 0,34143 atau Indeks Williamsonya menduduki peringkat kedelapan terendah, Kabupaten Sarolangun sebesar 0,34556 atau Indeks Williamsonya menduduki peringkat kesembilan terendah dan Kabupaten Merangin sebesar 0,39759 atau Indeks Williamsonya menduduki peringkat kesepuluh terendah sedangkan Indeks Williamson > 0,40 di Provinsi Jambi tidak ada.

Angka Indeks dari 10 Kabupaten/Kota tersebut mencerminkan tingkat pendapatan perkapitanya semakin membaik

sebagai akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Tingkat pendapatan perkapita tersebut sekaligus dijadikan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan kapasitas dasar yang layak bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai penetapan besarnya beban sumber penerimaan PAD melalui sumber-sumber penerimaan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan penerimaan lain yang sah. Rendahnya ketimpangan atau disparitas PAD di 7 Kabupaten/Kota dan 3 kabupaten yang termasuk ketimpangan atau disparitas sedang juga mencerminkan semakin besarnya PAD perkapita yang mampu dihimpun dari masyarakat melalui sumber penerimaan PAD. PAD perkapita untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah : Kabupaten Bungo peringkat 1 terbesar, Kabupaten Batanghari terbesar 2, Kota Jambi terbesar 3, Kabupaten Tanjungjabung Barat terbesar 4, Kabupaten Tebo terbesar 5, Kabupaten Merangin terbesar 6, Kabupaten Tanjungjabung Timur terbesar 7, Kabupaten Sarolangun terbesar 8, Kabupaten Kerinci terbesar 9 dan Kabupaten Muaro Jambi terbesar 10.

Tabel.1. Indeks Williamson PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson PAD						Rata-Rata	Rangking
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi PAD Perkapita	0,10966 -	0,13712 -	0,15832 -	0,18007 -	0,16021 -	0,18123 -	0,15444 91.601,587	5 3
Muaro Jambi PAD Perkapita	0,09521 -	0,10156 -	0,09679 -	0,08948 -	0,07165 -	0,09489 -	0,09160 29.272,255	4 10
Batanghari PAD Perkapita	0,08421 -	0,08327 -	0,05586 -	0,05274 -	0,04592 -	0,04226 -	0,06071 133.545,572	1 2
Sarolangun PAD Perkapita	0,34659 -	0,36548 -	0,33974 -	0,33111 -	0,34710 -	0,34332 -	0,34556 62.950,482	9 8
Merangin PAD Perkapita	0,42023 -	0,38866 -	0,38975 -	0,40351 -	0,38465 -	0,39871 -	0,39759 68.375,705	10 6
Tanjabbar PAD Perkapita	0,19530 -	0,18054 -	0,13321 -	0,13540 -	0,16652 -	0,13422 -	0,15753 90.132,757	6 4
Tanjatim PAD Perkapita	0,11150 -	0,17802 -	0,20547 -	0,18043 -	0,19365 -	0,20600 -	0,17918 65.152,580	7 7
Tebo PAD Perkapita	0,09541 -	0,09663 -	0,08116 -	0,07965 -	0,07438 -	0,07012 -	0,08289 75.964,642	3 5
Bungo PAD Perkapita	0,08742 -	0,07673 -	0,07111 -	0,05559 -	0,05234 -	0,05004 -	0,06554 201.850,550	2 1
Kerinci PAD Perkapita	0,33214 -	0,35009 -	0,34216 -	0,33278 -	0,34487 -	0,34651 -	0,34143 52.572,575	8 9

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

4.2. Disparitas Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah bertujuan : untuk memberikan konsekuensi terhadap besarnya dana yang diperlukan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan di daerah, menciptakan kesebandingan sumber-sumber penerimaan antar daerah yang miskin dengan kaya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini

tertinggal di bidang pembangunan, untuk mengintensifkan aktivitas dan kreatifitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah melalui upaya peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerahnya, mendukung terwujudnya good governance oleh pemerintah daerah, melalui perimbangan keuangan yang transparan dan untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif dan efisien melalui penyediaan SDM yang profesional, berahlak, bermoral yang baik.

Tabel.2. Indeks Williamson Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson Dana Perimbangan						Rata-Rata	Rank
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi	0,38488	0,30349	0,32898	0,37203	0,30524	0,32839	0,33717	8
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	605.964,908	9
Muaro Jambi	0,15642	0,09654	0,11623	0,10774	0,12904	0,15054	0,12609	5
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.320.575,288	4
Batanghari	0,34720	0,33876	0,36528	0,39058	0,39885	0,36652	0,36787	9
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.302.059,299	6
Sarolangun	0,09864	0,09232	0,08005	0,08124	0,07763	0,07043	0,08339	1
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.700.711,935	2
Merangin	0,38884	0,39713	0,40905	0,38443	0,38899	0,38127	0,39162	10
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	85.867,400	10
Tanjabbar	0,11501	0,08642	0,08214	0,08978	0,09163	0,08126	0,09104	3
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.788.095,733	1
Tanjatim	0,09835	0,09114	0,09552	0,09671	0,11214	0,11883	0,10212	4
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.318.062,368	5
Tebo	0,12086	0,12653	0,13096	0,15665	0,16843	0,11987	0,13722	6
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	760.550,070	8
Bungo	0,09992	0,09823	0,09117	0,08741	0,08134	0,08022	0,08972	2
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.487.344,018	3
Kerinci	0,13321	0,14672	0,13905	0,17629	0,19896	0,16772	0,16033	7
Dana Perimbangan Perkapita	-	-	-	-	-	-	923.525,840	7

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

Berdasarkan hasil perhitungan dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 7 Kabupaten/Kota memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan dana perimbangan selama tahun 2005 – 2010 di bawah 0,30 atau dalam golongan yang memiliki ketimpangan atau disparitas keuangan rendah. Kabupaten/Kota tersebut adalah : Kabupaten Sarolangun sebesar 0,08339 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 1 terendah, Kabupaten Bungo sebesar 0,08972 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 2 terendah, Kabupaten

Tanjungjabung Barat sebesar 0,09104 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 3 terendah, Kabupaten Tanjungjabung Timur sebesar 0,10212 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 4 terendah, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,12609 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 5 terendah, Kabupaten Tebo sebesar 0,13722 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 6 terendah dan Kabupaten Kerinci sebesar 0,16033 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 7 terendah.

Kabupaten yang memiliki ketimpangan atau disparitas PAD termasuk dalam golongan sedang atau Indeks Williamson antara 0,30 – 0,40 di Provinsi Jambi ada 3 Kabupaten yaitu : Kota Jambi sebesar 0,33717 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat kedelapan terendah, Kabupaten Batanghari sebesar 0,36787 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat kesembilan terendah dan Kabupaten Merangin sebesar 0,39162 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat kesepuluh terendah sedangkan Indeks Williamson $> 0,40$ di Provinsi Jambi tidak ada.

Angka Indeks dari 10 Kabupaten/Kota tersebut mencerminkan tingkat kemampuan menggali potensi dan pemanfaatan penerimaan dana perimbangan dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara optimal melalui penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Kemampuan menggali potensi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tersebut tercermin dari besarnya dana perimbangan perkapita di masing-masing Kabupaten/Kota. Dana perimbangan perkapita untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah : Kabupaten Tanjungjabung Barat terbesar 1, Kabupaten Sarolangun terbesar 2, Kabupaten Bungo peringkat 3 terbesar, Kabupaten Muaro Jambi terbesar 4, Kabupaten Tanjungjabung Timur terbesar 5, Kabupaten Batanghari terbesar 6, Kabupaten

Kerinci terbesar 7, Kabupaten Tebo terbesar 8, Kota Jambi terbesar 9 dan Kabupaten Merangin terbesar 10.

4.3. Disparitas Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Penerimaan bagi hasil pajak yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sumber peningkatan penerimaan ini berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan (Pph).

Berdasarkan hasil perhitungan dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 4 Kabupaten/Kota memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan bagi hasil pajak selama tahun 2005 – 2010 di bawah 0,30 atau dalam golongan yang memiliki ketimpangan atau disparitas keuangan rendah. Kabupaten/Kota tersebut adalah : Kabupaten Tanjungjabung Barat sebesar 0,03232 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 1 terendah, Kabupaten Tanjungjabung Timur sebesar 0,17119 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 2 terendah, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,21615 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 3 terendah dan Kabupaten Batanghari sebesar 0,26529 atau Indeks Williamsonnya menduduki peringkat 4 terendah.

Tabel.3. Indeks Williamson Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson Bagi Hasil Pajak						Rata-Rata	Rank
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi	0,45536	0,57410	0,44395	0,28460	0,21988	0,32203	0,38332	8
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	94.427,263	5
Muaro Jambi	0,14871	0,20708	0,24875	0,26939	0,26102	0,13195	0,21615	3
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	311.152,687	1
Batanghari	0,13985	0,22653	0,26645	0,30337	0,31226	0,34328	0,26529	4
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	226.216,179	3
Sarolangun	0,34400	0,34783	0,35905	0,32049	0,36844	0,26651	0,33439	5
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	204.295,725	4
Merangin	0,39905	0,40412	0,40657	0,39540	0,38763	0,40159	0,39906	10
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	80.105,777	7
Tanjabbar	0,03279	0,03685	0,02547	0,02989	0,03276	0,03614	0,03232	1
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	233.914,413	2
Tanjatim	0,19331	0,19704	0,18450	0,18101	0,09983	0,18142	0,17119	2
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	81.376,600	6
Tebo	0,34659	0,33541	0,35069	0,37712	0,36811	0,35419	0,35535	7
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	49.432,732	10
Bungo	0,33631	0,34312	0,33907	0,34478	0,35710	0,33615	0,34276	6
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	52.832,868	9
Kerinci	0,38091	0,39763	0,37943	0,40007	0,39062	0,40218	0,39181	9
BHP Perkapita	-	-	-	-	-	-	59.409,330	8

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

4.4. Disparitas Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Penerimaan bagi hasil pajak yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sumber peningkatan penerimaan ini berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam berupa penerimaan hasil hutan yaitu iuran hak pengusaha hutan (IHPH) dan provisi sumber daya hutan (PSDH), penerimaan hasil pertambangan umum, penerimaan hasil perikanan dan penerimaan pertambangan minyak, gas dan panas bumi.

Berdasarkan hasil perhitungan dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 5 Kabupaten/Kota memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan bagi hasil bukan pajak selama tahun 2005 – 2010 di bawah 0,30 atau disparitas keuangan rendah. yaitu Kabupaten Tanjab Timur Tebo Tanjab Barat Sarolangun dan Muaro Jambi.

Kabupaten yang memiliki ketimpangan sedang atau Indeks Williamson terletak antara 0,30 – 0,40 di Provinsi Jambi ada 4 Kabupaten yaitu : Kota Jambi Merangin, Batanghari, Kerinci, dan Bungo pada peringkat terendah.

Tabel.4. Indeks Williamson Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson Bagi Hasil Bukan Pajak						Rata-Rata	Rank
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi	0,35139	0,34879	0,32054	0,37856	0,36350	0,31505	0,34631	6
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	31.554,178	8
Muaro Jambi	0,23760	0,23870	0,26149	0,33815	0,37962	0,34328	0,29981	5
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	179.825,105	4
Batanghari	0,30102	0,34754	0,31560	0,44052	0,44967	0,45217	0,38442	8
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	42.476,723	7
Sarolangun	0,30712	0,29548	0,28331	0,28128	0,26657	0,28154	0,28588	4
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	249.284,563	3
Merangin	0,35674	0,36902	0,35441	0,35957	0,38900	0,39465	0,37057	7
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	25.703,428	10
Tanjabbar	0,13987	0,14437	0,11653	0,10903	0,11452	0,0941	0,11974	3
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	594.811,123	1
Tanjabtim	0,10119	0,11247	0,09331	0,12972	0,09145	0,11497	0,10719	1
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	347.046,097	2
Tebo	0,10221	0,11467	0,13313	0,13151	0,10416	0,10119	0,11448	2
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	126.079,053	5
Bungo	0,40890	0,40768	0,37798	0,39872	0,41510	0,39823	0,40110	10
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	26.517,123	9
Kerinci	0,35432	0,37609	0,43290	0,39761	0,40941	0,37621	0,39109	9
BHBP Perkapita	-	-	-	-	-	-	65.953,203	6

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

Angka Indeks dari 10 Kabupaten/Kota tersebut mencerminkan tingkat kemampuan menggali potensi dan pemanfaatan penerimaan hasil hutan yaitu iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) dan provisi sumber daya hutan (PSDH), penerimaan hasil pertambangan umum, penerimaan hasil perikanan dan penerimaan pertambangan minyak, gas dan panas bumi.

Rendahnya ketimpangan atau disparitas rata-rata bagi hasil bukan pajak di 5 Kabupaten diatas tidaklah

mencerminkan rata-rata bagi hasil bukan pajak perkapita. Dimana Kabupaten yang memiliki peringkat tertinggi rata-rata bagi hasil bukan pajak perkapita adalah : Kabupaten Tanjab Barat terbesar 1, Kabupaten Tanjab Timur terbesar 2, Kabupaten Sarolangun terbesar 3, Kabupaten Muaro Jambi terbesar 4 dan Kabupaten Tebo terbesar 5. Sedangkan Kabupaten Kerinci terbesar 6, Kabupaten Batanghari terbesar 7, Kota Jambi terbesar 8, Kabupaten Bungo terbesar 9 dan Kabupaten Merangin terbesar 10.

4.5. Disparitas DAU Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk tujuan mengurangi ketimpangan horizontal (horizontal imbalance). DAU disebut juga equalisation grant yaitu grant (bantuan) yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah yang miskin (kemampuan keuangan yang rendah) akan mendapat DAU yang lebih besar dari daerah yang kaya (kemampuan keuangan yang tinggi). DAU juga merupakan unconditional grant (bantuan tidak berkondisi) yang artinya dapat bebas digunakan oleh

daerah untuk mendanai kebutuhan yang diprioritaskan. Pemerintah Pusat tidak dapat mengarahkan penggunaan DAU.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa program pemerataan fiskal dirancang untuk membantu daerah yang rendah pendapatannya dan/atau tinggi biaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah yang tinggi pendapatannya dan/atau rendah biaya pelayanannya (Walsh & Thomson, 1994 dalam Bergvall dkk, 2006). Yang terjadi pada prakteknya adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal diantara daerah yang se-level sampai ke tingkat yang dapat diterima (acceptable level).

Tabel.5. Indeks Williamson DAU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2005 - 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson DAU						Rata-Rata	Rank
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi	0,19353	0,23029	0,23559	0,22936	0,30922	0,32979	0,25463	10
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	511.195,695	10
Muaro Jambi	0,18952	0,19094	0,18870	0,17958	0,12462	0,13157	0,16582	6
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	738.101,693	5
Batanghari	0,16643	0,22119	0,24908	0,24941	0,19411	0,18880	0,21150	8
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	597.519,868	7
Sarolangun	0,14945	0,09335	0,09183	0,08956	0,08152	0,07520	0,09682	2
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.164.350,538	2
Merangin	0,12965	0,11112	0,11895	0,12345	0,10851	0,10119	0,11548	5
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	595.239,742	8
Tanjabbar	0,09590	0,09432	0,09045	0,09276	0,10509	0,10623	0,09746	3
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	863.602,363	3
Tanjabtjm	0,18762	0,18132	0,20441	0,20003	0,22094	0,23518	0,20492	7
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	589.920,707	9
Tebo	0,23113	0,24210	0,23109	0,23009	0,24410	0,25880	0,23955	9
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	613.068,418	6
Bungo	0,14481	0,11149	0,09872	0,09557	0,09823	0,09110	0,10665	4
DAU Perkapita	-	-	-	-	-	-	1.166.074,263	1
Kerinci	0,10572	0,09806	0,09112	0,07532	0,08114	0,08320	0,08909	1
DAU	-	-	-	-	-	-	752.165,885	4
Perkapita								

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

Berdasarkan hasil perhitungan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan DAU selama tahun 2005 – 2010 di bawah 0,30 atau dalam golongan yang memiliki ketimpangan atau disparitas keuangan rendah adalah Kabupaten Kerinci Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kota Jambi menduduki peringkat 10 terendah.

Rendahnya ketimpangan atau disparitas rata-rata DAU di karenakan bersifat pemerataan fiskal antar daerah dan tidaklah mencerminkan rata-rata DAU perkapita setiap Kabupaten/Kota. Dimana Kabupaten yang memiliki peringkat tertinggi rata-rata DAU secara berurutan adalah : Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjungjabung Timur dan Kota Jambi. Rendahnya ketimpangan atau disparitas DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi karena tujuan pemberian DAU adalah dalam rangka mengurangi ketimpangan horizontal (horizontal imbalance) yang terjadi antara daerah dan sementara ini memberikan hasil.

4.6. Disparitas DAK Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Berbagai jenis transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, jenis transfer itu dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori tranfer yaitu : General Purpose Grant (Bantuan Umum), Specific Grant (Bantuan Khusus) dan Shared Revenue (Bagi Hasil). Specific Grant merupakan salah satu jenis transfer dari pusat ke daerah.

Tujuan tranfer dalam bentuk DAK adalah : untuk mencapai tujuan dan prioritas nasional di bidang tertentu namun urusannya telah didesentralisasikan ke daerah, untuk mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah, untuk mengakomodasi spillover benefit (penyediaan pelayanan publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain/tentangga) dan untuk mengakomodasi ke-khusus-an daerah tertentu.

Berdasarkan hasil perhitungan 6 Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan DAK di bawah 0,30 atau ketimpangan keuangan rendah berdasarkan peringkat untuk masing-masing : Kabupaten Tanjungjabung Timur Kabupaten Tanjungjabung Barat Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari sebesar 0,25497 peringkat 6 terendah.

Sementara Kabupaten yang memiliki ketimpangan atau disparitas bagi hasil bukan pajak termasuk dalam golongan sedang atau Indeks Williamson terletak antara 0,30 – 0,40 di Provinsi Jambi ada 4 Kabupaten yaitu : Kota Jambi sebesar 0,33946, Kabupaten Tebo sebesar 0,36478, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 0,37837 dan Kabupaten Kerinci sebesar 0,39315.

Peringkat Indeks Williamson rendah dan sedang dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidaklah mencerminkan besarnya DAK perkapita, dari hasil perhitungan tergambar bahwa

ketimpangan atau disparitas rendah dan sedang di Kabupaten/Kota memberikan rata-rata DAK perkapita dengan peringkat yang berbeda. Adapun urutan peringkat 10 Kabupaten/Kota tersebut adalah : Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjungabung Timur, Kabupaten Tanjungabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari.

Tabel.6. Indeks Williamson DAK Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson DAK						Rata-Rata	Rank
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi	0,37117	0,34119	0,33691	0,32887	0,31822	0,34038	0,33946	7
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	28.545,097	9
Muaro Jambi	0,38138	0,39054	0,39743	0,34095	0,38521	0,37472	0,37837	8
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	36.360,805	9
Batanghari	0,24446	0,25342	0,24770	0,26065	0,25904	0,26452	0,25497	6
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	26.218,623	10
Sarolangun	0,20005	0,20845	0,19414	0,25004	0,24960	0,22339	0,22095	5
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	58.062,833	4
Merangin	0,23709	0,23114	0,21905	0,22973	0,20125	0,20041	0,21978	4
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	58.313,347	3
Tanjabbar	0,18870	0,18237	0,17126	0,17659	0,14126	0,10417	0,16073	2
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	50.094,387	6
Tanjabt	0,14143	0,14055	0,10193	0,20996	0,17413	0,14662	0,15244	1
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	55.026,433	5
Tebo	0,34425	0,36644	0,35870	0,36772	0,39411	0,35745	0,36478	8
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	213.051,280	1
Bungo	0,34609	0,34126	0,12124	0,11416	0,11231	0,10090	0,18933	3
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	124.542,427	2
Kerinci	0,34265	0,40982	0,39616	0,39985	0,40442	0,40597	0,39315	10
DAK Perkapita	-	-	-	-	-	-	44.149,530	7

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

4.7. Disparitas Penerimaan Lain-Lain Yang Sah Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Penerimaan lain-lain yang sah juga bertujuan untuk memperkuat fundamental fiskal keuangan Kabupaten/Kota selain dana perimbangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sumber penerimaan lain-lain yang sah yang dapat dihimpun Kabupaten/Kota berasal dari : dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan dari propinsi atau PEMDA lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan 6 Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks Williamson rata-rata penerimaan lain-lain yang sah selama tahun 2005 – 2010 di bawah 0,30 yang memiliki ketimpangan keuangan rendah berdasarkan peringkat untuk masing-masing : Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Sementara Kabupaten yang memiliki ketimpangan atau disparitas penerimaan lain-lain yang sah

termasuk dalam golongan sedang atau Indeks Williamson terletak antara 0,30 – 0,40 di Provinsi Jambi ada 4 Kabupaten yaitu : Kabupaten Merangin sebesar 0,30731, Kabupaten Tanjungjabung Barat sebesar 0,33564, Kabupaten Tebo sebesar 0,35356 dan Kabupaten Kerinci sebesar 0,39599. Peringkat Indeks Williamson rendah dan sedang dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidaklah mencerminkan besarnya rata-rata penerimaan lain-lain yang sah perkapita, dari hasil perhitungan tergambar bahwa ketimpangan atau disparitas rendah dan sedang di Kabupaten/Kota memberikan urutan peringkat sebagai berikut : Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun.

Tabel.7. Indeks Williamson Lain-Lain Yang Sah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2010

Kabupaten/ Kota	Indeks Williamson Lain-Lain Yang Sah						Rata-Rata	Rank
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kota Jambi	0,21132	0,20619	0,19112	0,30764	0,24407	0,21936	0,22995	3
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	29.099,150	7
Muaro Jambi	0,23821	0,24742	0,27461	0,31530	0,39413	0,28631	0,29266	6
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	15.590,497	9
Batanghari	0,21429	0,21007	0,24996	0,25228	0,24120	0,24717	0,23583	4
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	40.745,477	5
Sarolangun	0,14427	0,14273	0,15996	0,14331	0,20530	0,18532	0,16348	1
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	10.558,490	10
Merangin	0,37924	0,34879	0,29854	0,27650	0,27119	0,26943	0,30731	7
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	32.360,057	6
Tanjabbar	0,32326	0,33760	0,34621	0,33097	0,33571	0,34006	0,33564	8
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	52.932,140	4
Tanjatim	0,30004	0,29861	0,29112	0,28675	0,26886	0,30215	0,29123	5
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	28.700,125	8
Tebo	0,35516	0,34701	0,35558	0,37698	0,34541	0,34120	0,35356	9
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	57.063,858	2
Bungo	0,36632	0,36107	0,12874	0,11740	0,11120	0,10414	0,19815	2
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	163.297,893	1
Kerinci	0,37510	0,37789	0,40962	0,39989	0,40067	0,41275	0,39599	10
Lain Perkapita	-	-	-	-	-	-	54.728,152	3

Sumber : data diolah dan data tahun 2010 diolah menggunakan data sementara

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Rata-rata kesenjangan atau disparitas keuangan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2005-2010 yaitu : PAD (7 Kabupaten/Kota termasuk katagori disparitas rendah dan 3 Kabupaten termasuk katagori disparitas sedang), dana perimbangan (7 Kabupaten termasuk katagori disparitas rendah dan 3 Kabupaten/Kota termasuk katagori disparitas sedang), bagi hasil pajak (4 Kabupaten termasuk katagori disparitas rendah dan 6 Kabupaten/Kota

termasuk katagori disparitas sedang), DAU (10 Kabupaten/Kota termasuk katagori disparitas rendah, DAK

(6 Kabupaten termasuk katagori disparitas rendah dan 4 Kabupaten/Kota termasuk katagori disparitas sedang), penerimaan lain - lain yang sah (6 Kabupaten/Kota termasuk katagori disparitas rendah dan 4 Kabupaten termasuk katagori disparitas sedang) dan untuk bagi hasil bukan pajak (5 Kabupaten termasuk katagori disparitas rendah, 4 Kabupaten/Kota termasuk katagori disparitas sedang dan 1 Kabupaten termasuk katagori disparitas tinggi)

5.2.Saran

Tingkat kesenjangan atau disparitas keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata tergolong rendah dan harus dipertahankan dimasa akan datang dalam rangka memperkuat fundamental fiskal Kabupaten/Kota serta menjaga ketersediaan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Untuk itu di masa datang pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan yang potensial melalui pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia secara optimal, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemampuan menekan tingkat kelahiran, peningkatan pendapatan perkapita masyarakatnya, kemampuan mengalokasikan sumber penerimaan pada kegiatan produktif, perbaikan cara penetapan jenis penerimaan daerah dan perhitungan yang tepat dan benar dari hasil dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bergvall, Daniel; Charbit, Claire; Kraan, Dirk-Jan and Merk, Olaf*, (2006), Intergovernmental Transfers And Decentralised Public Spending, OECD Journal on Budgeting, Volume 5, Number 4, 2006.
- Blakely, E.J*, 1994, Planning Local Economic Development : Theory And Practice, Second Edition, Sage Library Of Social Research.
- Djamin, Zulkarnain*, 1993, Perekonomian Indonesia, FE UI Jakarta.
- Koncoro. M*, 2004, Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar*, 1997, Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran dan prakteknya, LP3ES, Jakarta.
- Mahi, Raksaka*, 2005, Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.VI N0.1. Juli.
- Mardiasmo*, 2002, Otonomo Dan Keuangan Daerah, BP FE-UGM, Yogyakarta.
- Richardson, W. Harry*, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Edisi Revisi, LPFE UI, Jakarta.
- Suparmoko, M*, 2001, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Tarigan, M.R.P, Robinson*, 2005, Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tambunan, Tulus*, 2001, Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta.